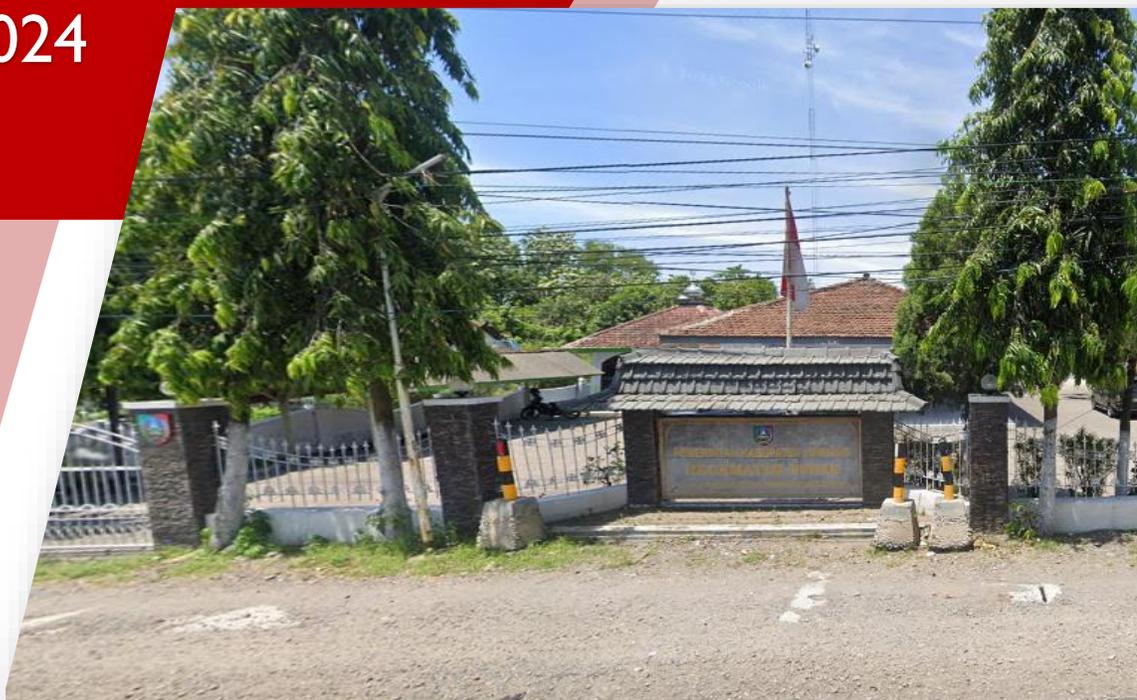


**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PERAK**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN PERAK
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Perak Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Perak Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jombang

Perak, Desember 2024
CAMAT PERAK



Drs. SUPRIYONO
Pembina
NIP.197010131992011001

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Perak sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Perak, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

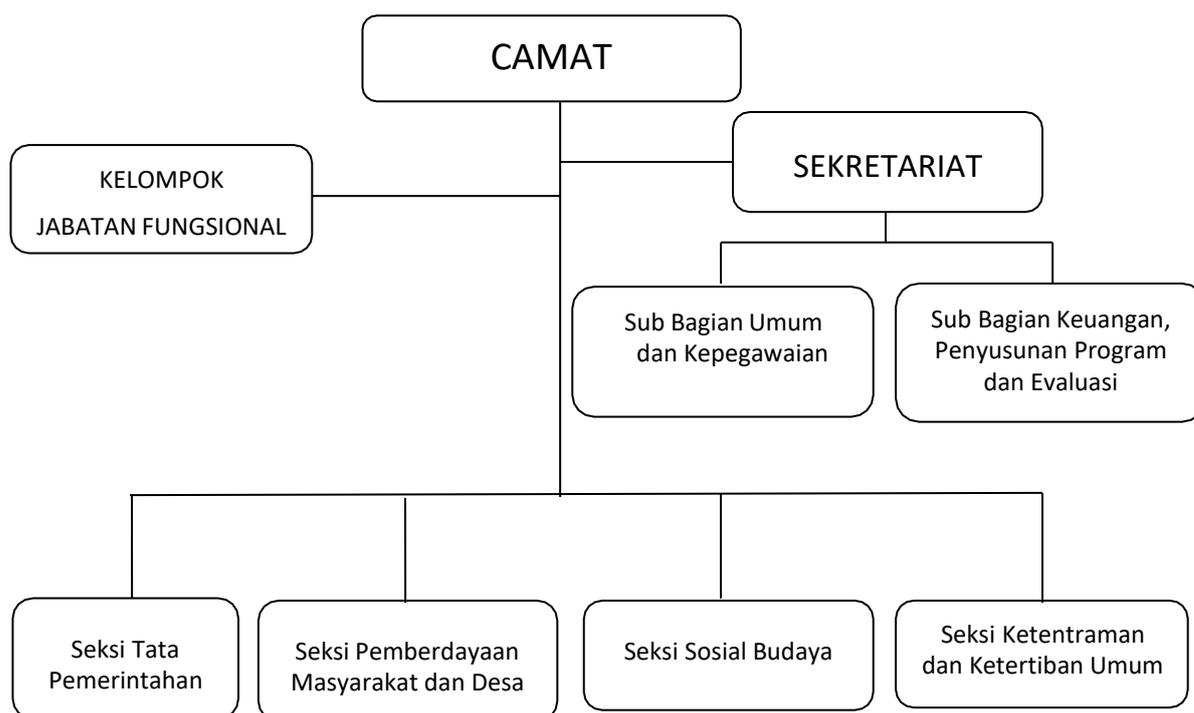
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Perak diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan..

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Perak



Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Perak, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Perak Kabupaten Jombang per bulan Januari 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV Kecamatan Perak

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. SUPRIYONO	197010131992011011	Camat
2	ABDUL WAKHID, SE	196812011994031006	Sekretaris Kecamatan
3	SANTOSA, S.Sos	196605041996021001	Kasi Tata Pemerintahan
4.	SUHEDI,S.IP	19670128 1989121001	Kasi Pemerdayaan Masyarakat Desa
5.	DINI NURFIBRIANY, S.E., MM	198302272011012002	Kasi Sosial budaya

6.	IDA AYU NURSANTI,SE	198012042006042025	Kasubag Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
7.	BAGUS RACHMAT, S.IP	198509282005011001	Kasubag Keuangan Penyusunan Program,dan Evaluasi

Tabel 2.2
Pegawai Jabatan Staf/Pelaksana

No	Nama	NIP	Jabatan
1	AHMAD SHOLI	19680812 200604 1 007	Staf Kasi Tata Pemerintahan
2	YUNI SUSILAWATI	19790626 201001 2 001	Staf Kasi Tata Pemerintahan
3	TITIK ZAKIYAH, SE	19680110 201001 2 001	Staf Kasi Tata Pemerintahan
5	CHOLILUL UZAIR	19741024201001 1 004	Staf Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Evaluasi
6	DANY EKA NOVITASARI, A.Md.Keb	198401032017042003	Staf Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Evaluasi
7	IRFAN YUDIANTO	19691124 200906 1 002	Staf Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum
8	SLAMET	19670323 200801 1 009	Staf Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum
9	SETYA BUDI	19660910 199003 1 009	Staf Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum
10	AMBAR SULISTYOWATI	19780601 200901 2 002	Staf Pelaksana Subag Umum dan Kepegawaian
11	NURCHOLIS	19670607 20070 1 1 026	Staf Pelaksana Subag Umum dan Kepegawaian
12	SAIFUDIN ZUHRI	19730308 200906 1 001	Staf Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Evaluasi

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;

- i. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- j. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- l. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga;
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
7. Pengelolaan kearsipan;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
9. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan, membawahi ;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- e. Menghimpun data asset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;

- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
3. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusanlain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
5. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
6. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
7. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
3. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi dibidang sosial budaya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;

5. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
6. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama diwilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan dengan Bupati;
9. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Perak Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut

1 Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Perak dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, adalah:

- a. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Perak sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Perak.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja.
- c. Belum terakomodirnya seluruh usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Perak yang disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Jombang.
- d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Perak kurang cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Perak terkendala dengan cepatnya usia fisik, dikarenakan sebagian besar jalan di wilayah Kecamatan Perak merupakan jalan utama antar Kabupaten dengan lalu lintas cukup padat menyebabkan jalan sering dilalui kendaraan – kendaraan besar dengan muatan banyak.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Perak pada tahun 2024 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dengan tema/arrah pembangunan daerah tahun 2025 yang harus dapat diwujudkan

adalah “Hilirisasi Agrobisnis yakni peningkatan nilai tambah produk pertanian dengan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian sebelum sampai ke tangan konsumen. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing, pendapatan petani, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 adalah:
 - a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPD Kab. Jombang Tahun 2024-2026
 - b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan
 - c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Perak belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah keempat yang tertuang dalam dokumen P-RKPD Kab. Jombang tahun 2024 yakni peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang sehingga semua langkah- langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Perak sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024-2026.

Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Program Internasional SDGs (Sustainable Development Goals) adalah sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia.

SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun MDGs (Millenium Development Goals). Ini merupakan hasil pertemuan pada 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa), New York, Amerika Serikat yaitu Sustainable Development Summit, yang di dalamnya merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Adapun tujuan SDGs adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

Target utama SDGs adalah mengentaskan kemiskinan. Tapi, Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan atau social economic development dan lingkungan yang besar atau environmental development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini :

1. Tanpa Kemiskinan, Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan, Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4. Pendidikan Berkualitas Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
8. Mengurangi Kesenjangan Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
9. Keberlanjutan Kota dan Komunitas Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
10. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
11. Aksi Terhadap Iklim Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
12. Kehidupan Bawah Laut, Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
13. Kehidupan di Darat Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemaknaan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
14. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

15. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Telahaan visi dan misi Kabupaten Jombang yang terkait dengan OPD Kecamatan Perak memberikan gambaran peran serta keterlibatan secara langsung terhadap tujuan global SDGs yaitu

sebagai berikut: Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional mendukung tujuan global SDGs yang ke-16 yakni: Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

Program/Kegiatan yang dilaksanakan di setiap OPD di Kabupaten Jombang dalam hal ini Kecamatan Perak mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang berkesinambungan dengan program SDGs.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
- b. Jaringan Internet yang masih terkadang crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
- e. Perubahan KTP SIAK menjadi e- KTP di Kecamatan Perak saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e – KTP terkadang tidak dapat dioperasikan yakni alat perekaman sidik jari dan iris mata terkadang trouble sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang;

- f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Perak cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode) dan perangkat scanner hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal .

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
- c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;
- e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Perak terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
 - a. Perencanaan Pembangunan
 - Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kab. Jombang.

- Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024- 2026 sehingga diperlukan output yang lebih aspiratif.
 - Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
- b. Keamanan dan Ketertiban
- Pada Tahun Anggaran 2024, OPD Kecamatan Perak dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Perak dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
- c. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- Pada Tahun Anggaran 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Perak melalui 1 (satu) Program rutin dan 5 program Kecamatan dengan 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan.
- d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di era globalisasi diantaranya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), perdagangan transnasional, serta perkembangan teknologi informasi.

1.4 CASCADING

Tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Berdasarkan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Perak Kabupaten Jombang terkait dengan pencapaian misi pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional, akuntabel, inovatif, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas.

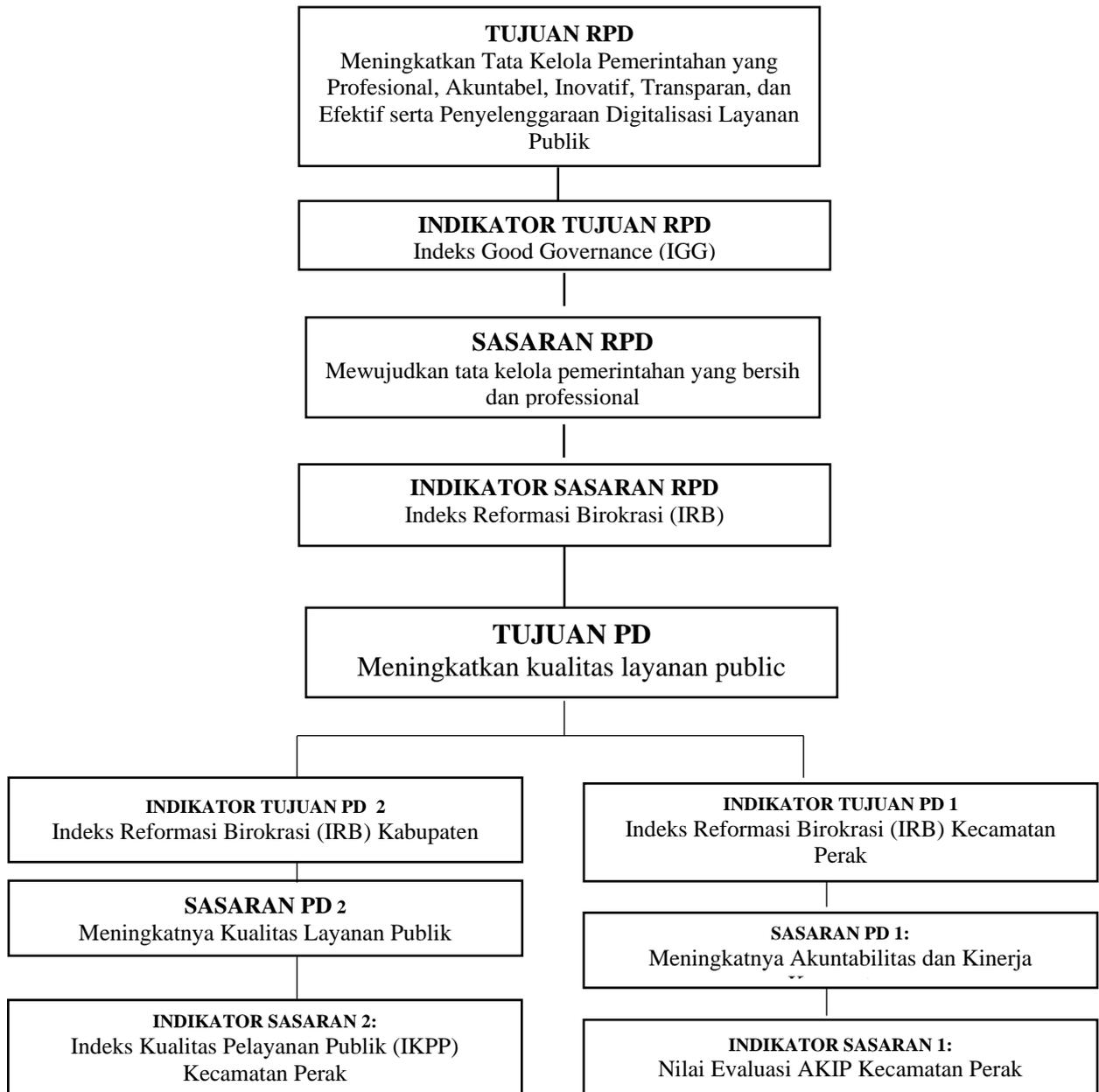
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengantujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Tujuan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi :

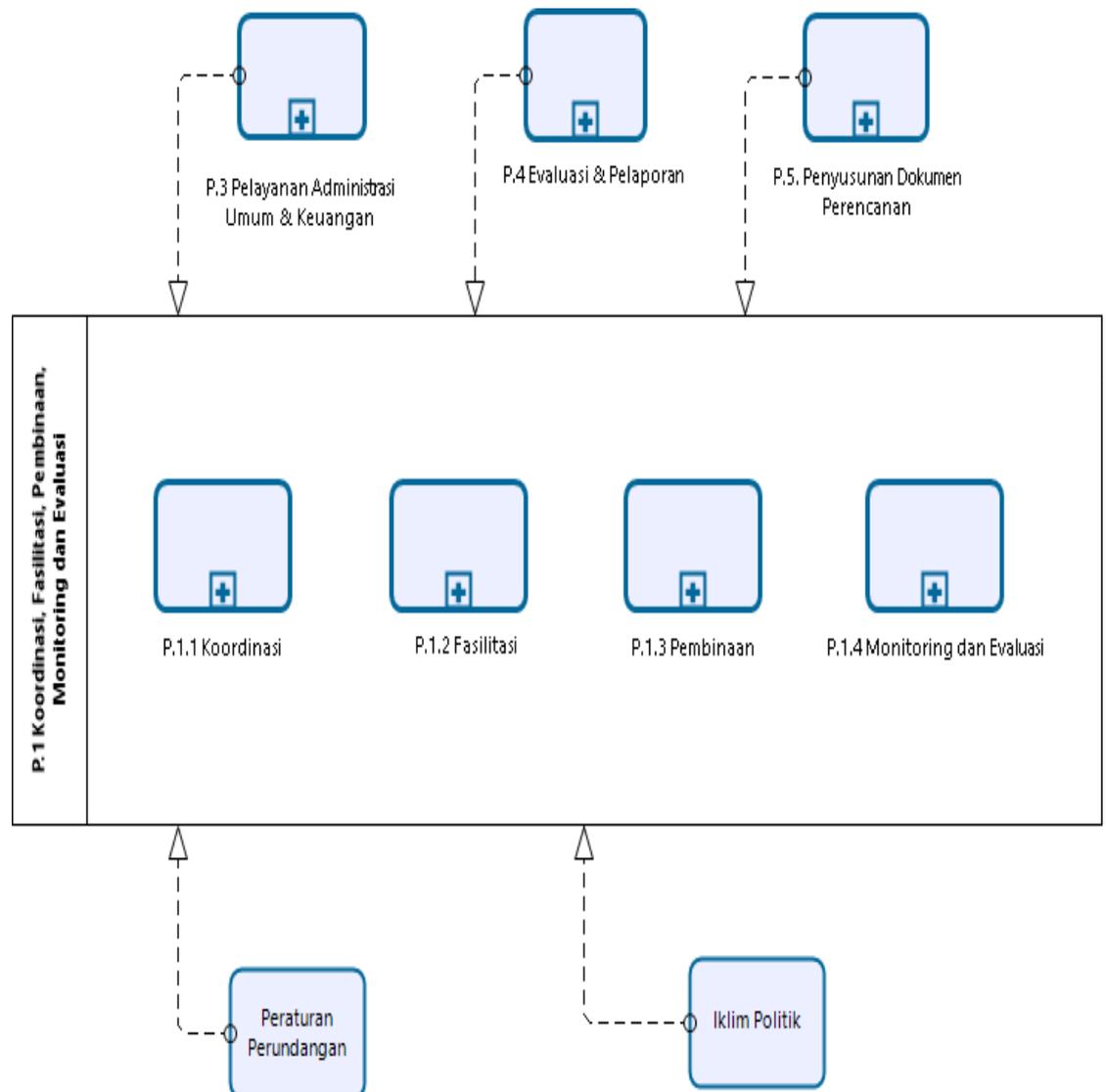
1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan.

Adapun Keterkaitan antara dokumen RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dengan dokumen RKPD dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah adalah untuk menjamin sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan. Prioritas dan target pembangunan dalam RPD selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).



1.5 PETA PROSES BISNIS

Kecamatan Perak Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana berikut:



P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

A. NILAI SAKIP

- Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Tahun 2024

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: X.700/559/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Perak Tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Perak Tahun 2024 adalah 74,64 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik”. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3
Hasil Nilai SAKIP Kecamatan Perak Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	LKE	Evaluasi Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30	25,53	21,95	24,81	82,70
2	Pengukuran Kinerja	30	21,40	13,75	19,87	66,23
3	Pelaporan Kinerja	15	11,79	7,17	10,87	72,47
4	Evaluasi Kinerja	25	19,09		19,09	76,36
	Total	100	77,81	42,87	74,64	

- Rekomendasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Kecamatan Perak.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Perak Kabupaten Jombang, agar :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui tahapan penjenjangan kinerja sesuai ketentuan dimulai dari identifikasi masalah berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan terus melibatkan seluruh pegawai melalui penjaringan ide/masukan dalam seluruh proses perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Agar disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja.
3. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Laporan kinerja perlu disusun melalui proses analisis yang tepat dan sungguh-sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga setiap periodenya selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja.
4. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara memadai dengan memperhatikan kualitas dokumen yang dapat diwujudkan dalam penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan cascading.

B. NILAI REFORMASI BIROKRASI

- Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Tahun 2024

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 000.8.6/10012/415.10/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Perak Tahun 2024, nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Perak Tahun 2024 adalah 74,90 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

Hasil Nilai Reformasi Birokrasi Kec Perak Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	6,37
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1,25
	Rencana Aksi	4%	2,67
	Monitoring dan Evaluasi	4%	2,45
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90%	68,52
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	38,49
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	30,03
Indeks Reformasi Birokrasi		100%	74,90

Hasil penilaian indikator kegiatan utama pada Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah			Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	0 - 5	2	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3	Indeks Penerapan SPBE	0 - 100	75.70	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks Perencanaan Pembangunan	0 - 100	93.99	BAPPEDA

5	Nilai SAKIP	0 - 100	74,64	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6	Tingkat Digitalisasi Layanan	0 - 100	100	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7	Tingkat Pembangunan ZI	0 - 5	2	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8	Maturitas SPIP	0 - 5	3	Inspektorat
9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	1-5	3.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	0 - 4	3,98	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
11	Indeks Pengawasan Kearsipan	0 - 100	73.71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0 - 100	97.50	Bagian PBJ Sekretariat daerah
13	Indeks Pengelolaan Keuangan	0 - 100	100	BPKAD
14	Indeks Pengelolaan Aset	0 - 100	76,81	BPKAD
15	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	0 - 100	97.01	Inspektorat
16	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	0 - 100	100,00	BKPSDM
17	Indeks Profesionalitas ASN	0 - 100	76.28	BKPSDM
18	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	0-4	2.00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
19	Indeks Pelayanan Publik	0-5	3.45	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 - 100	93.53	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

➤ Rekomendasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Perak

Atas dasar beberapa catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Kecamatan Perak, rekomendasi hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

- Membentuk dan menetapkan Tim Pengelolaan RB Perangkat Daerah dalam sebuah Keputusan

- Agen perubahan dapat membuat proyek kecil yang implementatif dan berdampak pada unit kerja dengan langkah-langkah antara lain menyusun, mengimplementasikan, dan mendokumentasikan rencana tindak
- Melakukan langkah-langkah peningkatan pemahaman dan penguatan komitmen pembangunan Reformasi Birokrasi seluruh pegawai khususnya tim pembangunan RB
- Melakukan analisis dan pahami seluruh catatan dan rekomendasi yang kemudian disusun rencana tindak lanjut serta direalisasikan dalam rangka melakukan perbaikan terhadap pembangunan RB
- Melakukan perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya
- Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan pembangunan RB, serta ditindaklanjuti bahkan dapat dilakukan perbaikan rencana aksi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatannya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1.1 RENCANA STRATEGIS

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Perak pada periode Tahun 2024-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan

pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Perak mendukung Tujuan Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 . Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang relevan. Tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jombang 2024-2026 dijabarkan menjadi empat (4) tujuan, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdayasaing.
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya.
4. Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana kinerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Rencana kinerja Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2024.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Perak atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Perak Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Perak Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024,

dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Perak untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan :

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Perak
Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	73
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	7,8

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja Aparatur	100%	52.08 %	70.83 %	85.42 %	100%	3.025.434.166
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	86	26.05%	51.70%	75.85%	100%	6.163.750
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	25%	50%	75%	100%	73.791.200
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	25%	50%	75%	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	100%	25%	50%	75%	100%	19.510.000

5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	12,50 %	50,00 %	62,50 %	100 %	7.505.000
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	62,50 %	75,00 %	87,50 %	100 %	47.843.500
Jumlah									3.180.247.616

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Perak dengan pemerintah, ditetapkan sebagaimana table berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Perak tahun n	Hasil Evaluasi AKIP Kec. Perak	Camat Perak
		<p>Definisi Operasional : Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</p>			
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	$IKPP = \frac{(IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)}{2}$	Hasil survey IKM dan IPP Kecamatan Perak	Camat Perak
		<p>Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>			

		<p>Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran/Masukan, dan Sarana/Prasarana</p> <p>Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun 2017)</p>			
--	--	--	--	--	--

Sebagai upaya merealisasikan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah dirumuskan Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Perak, yaitu:

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator, Target dan Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	FORMULASI
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh PNS Kec Perak -----x100% Jumlah PNS Kec Perak
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100% Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yng tersusun tahun n

1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100% Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100% Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Perak yang difasilitasi	19 orang/bulan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Perak yang difasilitasi tahun n
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n
1.2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n

1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100% Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
1.3.1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	8 Paket	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n
1.3.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	24 Paket	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n
1.3.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	1 Paket	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi tahun n
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tahun n
1.3.5	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 Dokumen	Jumlah pemenuhan bahan bacaan tahun n
1.3.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100% Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan

1.4.1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	58 unit	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedungkantor tahun n
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100% Jumlah perencanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
1.5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdayaair dan listrik yangterfasilitasi	24 Laporan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
1.5.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang milik daerah dalam kondisi baik -----x100% Jumlah Barang milik daerah
1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n

1.6.2	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	24 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara tahun n
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	86	Nilai PATEN Kecamatan Perak tahun n
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan pelayanan Adminduk yang di verifikasi -----x100% Jumlah pengajuan pelayanan Adminduk
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan perizinan yang diverifikasi -----x100% Jumlah pengajuan perizinan
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100% Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
3.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 Laporan	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n

3.1.1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 Kegiatan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan Tahun n
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	Jumlah Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu -----x100% Jumlah Desa
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan APBDes dengan lengkap	13 Desa	Jumlah Desa yang melaporkan APBDes dengan lengkap tahun n
4.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa	26 Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa tahun n
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	Jumlah desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif -----x100% Jumlah desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

5.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 Lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tahun n
5.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n
5.1.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	Jumlah PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan -----x100% Jumlah PHBN/ PHBA
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah rekomendasi Forkopimcam
6.1	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA	1 laporan	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA tahun n
			Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam tahun n
6.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	
6.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Perak sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
AA	> 90 s/d 100	: Sangat Memuaskan
A	> 80 s/d 90	: Memuaskan
BB	> 70 s/d 80	: Sangat Baik
B	> 60 s/d 70	: Baik
CC	> 50 s/d 60	: Cukup Baik
C	> 40 s/d 50	: Agak Kurang
D	0 s/d 40	: Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari

0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Perak memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2024-2026 serta Renja Perubahan tahun 2024.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Perak diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2024, Kecamatan Perak memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Perak tahun 2024 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembandingan, meliputi:

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Perak Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan Kecamatan :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	73	74,64	102%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	7,8	8,13	104%
Rata-rata Capaian IKU				103%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian IKU KecamatanPerak pada tahun 2024 telah tercapai 103% (predikat sangat memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 73 telah tercapai 74,64 dengan tingkat capaian 102% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/559/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024.

Berikut kami sajikan data pendukung keberhasilan pencapaian nilai evaluasi AKIP Kecamatan Perak :

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24,81	Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 24,81 dari bobot 30% atau dengan capaian 82,70% (BB) yang berarti bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu perencanaan masih terpaku pada tugas pokok dan fungsi sehingga belum dapat merumuskan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan utama dalam mencapai tujuan organisasi.

2.	Pengukuran Kinerja	30%	19,09	Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 19,09 dari bobot 30% atau dengan capaian 66,23% (CC) yang berarti bahwa sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%), masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu Sebagian pegawai belum memahami bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya dan juga dalam melakukan pengukuran kinerja perlu mempertimbangkan capaian kinerja Organisasi serta belum dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi.
3.	Pelaporan Kinerja	15%	6,91	Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 10,87 dari bobot 15% atau dengan capaian 72,47% (B) yang berarti bahwa sebagian besar kriteria telah terpenuhi. Dalam upaya kinerja yang telah dibuat inovasi yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat atau pengguna layanan, namun Sebagian besar pegawai belum memahami hal tersebut serta laoran kinerja belum menggambarkan adanya perbaikan .

4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,09	Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 19,09 dari bobot 25% atau dengan capaian 76,36% (B) yang berarti bahwa sebagian besar kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu belum memperhatikan kualitas dokumen terutama pada komponen perencanaan kinerja sehingga masih terdapat ketidakselarasan antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) dengan cascading kinerja.
Jumlah		100%	74,61	

Sasaran II : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak dengan indikator kinerja :

1. IKM Kecamatan Perak

IKM Kecamatan Perak ditargetkan 94 telah tercapai 93,53 dengan tingkat capaian 99,5% berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4.45/398/415/10.1.3/2024. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2024 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik..

Berikut kami sajikan data pendukung IKM Kecamatan Perak per jenis layanan :

NO	JENIS LAYANAN	IKM 2024
1.	KTP	98,35
2.	KK	98,02
3.	SKCK	92,59
4.	Mutasi / Pindah Kependudukan	98,15
5.	Surat Keterangan Lainnya	80,56
IKM Unit Layanan		93.53

2. IPP Kecamatan Perak

IPP Kecamatan Perak ditargetkan 3,10 telah tercapai 3,45 dengan tingkat capaian 111,3% berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4.45/400/415/10.1.3/2024.

Berikut kami sajikan data pendukung IPP Kecamatan Perak :

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	BOBOT	JUMLAH NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK
1.	Aspek Kebijakan Pelayanan	30%	3,58	0,86
2.	Aspek Profesionalisme SDM	18%	2,2	0,55
3.	Aspek Sarana dan Prasarana	15%	4,09	0,74
4.	Aspek SIM Pelayanan Publik	15%	3,2	0,35
5.	Konsultasi dan Pengaduan	15%	4,6	0,46
6.	Inovasi	7%	1	0,12
Indeks Pelayanan Publik		100%	18,67	3,45

2. Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait.

Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait target tahun 2024 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%) berat kerjasama yang baik antar stakeholder sehingga semua laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum dapat ditindaklanjuti instansi terkait.

3. Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu. Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu target tahun 2024 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%) berat kerjasama yang baik dengan desa sehingga semua laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dapat dilaporkan tepat waktu.

4. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu target tahun 2024 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%) berat kerjasama yang baik dengan desa sehingga semua Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa dapat dievaluasi tepat waktu.

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Perak Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	103%
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	-

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Perak Tahun 2024 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Telaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporan	5 laporan	100%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec.	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	100%

			Perak yang di fasilitasi			
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
1.2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	100%
1.3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	24 Paket	24 Paket	100%
1.3.2	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
1.3.3	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.3.4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
1.4.1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor /	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	10 unit	10 unit	100%

	bangunan lainnya	lainnya				
1.4.2	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	0
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
1.5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	24 laporan	24 laporan	100%
1.5.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	0	0	0
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	10 unit	100%
1.6.2	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	8 unit	8 unit	100%

1.6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Perak yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	86	78,25	91%
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3.1	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	100%
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100%

3.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	100%	100%
4.1.1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara	12 laporan	12 laporan	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%

5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan APBDes dengan lengkap	13 Desa	13 Desa	100%
5.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
6.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100%
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa	13 Desa	100%
6.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	78 lembaga	100%
6.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100%

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		% Capaian	Tahun 2023		% Capaian	Tahun 2024		% Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	Nilai	71	70,93	99,9	72	72,61	100,8 %	73	74,64	102%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak	IKM Kecamatan Perak	Nilai	86	89,85	104,5	89,95	94,39	104,9 %	94	93,53	99,5%
	IPP Kecamatan Perak	Nilai	3,10	2,31	74,5	3,10	2,45	79%	3,10	3,45	111,3%

Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Persen	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	Persen	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	Nilai	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	76,5	80,25	105,6%	85,3	85,33	100%	86	78,25	91%
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan
 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai evaluasi AKIP Kecamatan Perak dari tahun 2022, 2023 dan 2024 selalu mengalami peningkatan disebabkan karena penerapan standart SAKIP pada pelaksanaan tupoksi oleh masing – masing stakeholder sudah berjalan dengan baik.

Sasaran II : Meningkatnya kualitas layanan Publik

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. IKM Kecamatan Perak dari tahun 2022-2024 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2022 – 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,54 dan 2023 – 2024 mengalami penurunan sebesar 0,86.
2. IPP Kecamatan Perak dari tahun 2022-2023 mengalami kenaikan sebesar 0,14 dan pada tahun 2023 – 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,0
3. Pada tahun 2024 terdapat perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja yang sebelumnya sasaran II adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak menjadi meningkatnya kualitas pelayanan public dengan indikator Nilai IKPP
4. IKPP Kecamatan Perak pada tahun 2024 melebihi target IKPP yang telah ditetapkan yakni 7,8 dengan realisasi tahun 2024 sebesar 8,13 atau meningkat 0,33

3.1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	75	74,61	99,5%
Meningkatnya kualitas layanan Publik	IKPP Kecamatan Perak	7,95	8,13	102,3%
RATA – RATA TINGKAT KEMAJUAN				100,9%

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	85,3	78,25	91,7%
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi nilai evaluasi AKIP Kecamatan Perak adalah 74,61 dari target akhir Perubahan Renstra sebesar 75 Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 99,5% dari target akhir RPJMD/Renstra.

Sasaran II : Meningkatnya kualitas layanan publik

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran IKPP kecamatan Perak dengan realisasi nilai IKPP Kecamatan Perak adalah 8,13 dari target akhir Perubahan Renstra sebesar 7,95 Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 102,3% dari target akhir RPJMD/Renstra dengan rincian :

1. IKM Kecamatan Perak, realisasi 93,53 dari target Perubahan Renstra sebesar 89 Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 105% dari target akhir RPJMD/Renstra.
2. IPP Kecamatan Perak realisasi 3,45 dari target Perubahan Renstra sebesar 3,5. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 98,6% dari target akhir RPJMD/Renstra.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui Perbandingan Target akhir

Renstra dengan Realisasi pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pada Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ kota Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur, realisasi 100% dari target Perubahan Renstra sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD/Renstra.
2. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Nilai PATEN Kecamatan Perak realisasi 78,25 dari target Renstra sebesar 85,3. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 91% dari target akhir RPJMD/Renstra.
3. Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan dan Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti, realisasi 100% dari target Perubahan Renstra sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD/Renstra.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait, realisasi 100% dari target Perubahan Renstra sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD/Renstra.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu, realisasi 100% dari target Perubahan Renstra sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD/Renstra.
6. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif realisasi 100% dari target Perubahan Renstra sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD/Renstra.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama periode Renstra 2024-2026 dimana Pada tahun 2024 target sasaran strategis renstra dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 100,9%.

3.1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Level Nasional/Internasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Level Nasional/Internasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2024	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket.
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIPKec. Perak	74,61 (BB)	72,33 (BB)	83,89 (A)	64,23	Tercapai
2	Meningkatnya kualitas layanan Publik	IKPP Kecamatan Perak	8,13	8,45	-	-	-

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Realisasi tahun 2024	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	-	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	78,25	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	-
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	-
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	-
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa :

a. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak telah tercapai 74,64 melebihi realisasi nilai AKIP Kabupaten sebesar 72,33 dan melebihi dari rata-rata nasional yaitu nilai akuntabilitas kinerja nasional 64,23 dengan selisih 10,41.

b. Standar Nasional :

1. IKPP Kecamatan Perak

Standar nasional untuk indikator strategis diatas tidak ada.

3.1.5. Analisis Atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024 target sasaran strategis Kecamatan Perak dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 103% dengan kata lain kinerja kecamatan belum mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

1. Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja :

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya Kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Dukungan dan komitmen Camat Perak, Kepala UPTD/B se Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Perak untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Faktor penghambat / permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja :

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan per Undang-undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai
- d. Implementasi pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa

Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan.

- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dan RB dalam menjalankan tupoksi.

2.1. Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perundangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait tanggung jawab penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi agar semua stakeholder memahami bahwasanya SAKIP adalah tanggung jawab bersama.

3. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Tahun 2024 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2024, sesuai dengan perjanjian kinerja antara Bupati Jombang dengan Camat Perak, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum

Pemerintah Kabupaten Jombang telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, Kecamatan Perak menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaiberikut :

Tabel 3.7
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran,
Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang /Kurang	%
2	3	4	5			
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	3.025.434.166	2.841.094.465	Sangat Menunjang	93,91%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	6,001,500	6,001,500	Sangat menunjang	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 Dokumen	4,451,500	4,451,500	Sangat Menunjang	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 Laporan	1,550,000	1,550,000	Sangat Menunjang	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	2,506,813,032	2,362,081,364	Sangat Menunjang	94.23%
	Persentase laporan keuangan yang Tersusun sesuai aturan	100%				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Perak yang difasilitasi	20 orang/bulan	2,454,556,932	2,309,846,114	Sangat Menunjang	94.10%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Laporan penatausahaan dan verifikasi keuangan	12 Dokumen	51,206,100	51,197,500	Sangat Menunjang	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen	1,050,000	1,037,750	Sangat Menunjang	98.83%

Program/Kegiatan/S ubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ubKegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang /Kurang	%
2	3	4	5			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	110,466,750	103,220,175	Sangat Menunjang	93.44%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	24 paket	19,236,500	19,205,500	Sangat Menunjang	99.84%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	1 Paket	48,400,000	41,810,000	Sangat Menunjang	86.38%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	8,990,250	8,990,250	Sangat Menunjang	100%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 dokumen	2,352,000	2,352,000	Sangat Menunjang	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	31,488,000	30,862,675	Sangat Menunjang	98.01%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	121,286,350	117,943,000	Sangat Menunjang	97.24%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	71 unit	121,286,350	117,943,000	Sangat Menunjang	97.24%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	32,295,180	27,673,944	Sangat Menunjang	85.69%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	27,924,500	27,781,221	Sangat Menunjang	99.49%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	160,976,200	157,288,100	Sangat Menunjang	97.71%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	56,268,200	52,615,100	Sangat Menunjang	93.51%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	180,961,870	180,260,670	Sangat Menunjang	99.61%
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	24 unit	16,240,000	16,213,350	Sangat Menunjang	99.84%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	85	6.163.750	6.163.750	Sangat Menunjang	100%

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	6,526,250	6,526,250	Sangat Menunjang	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6,526,250	6,526,250	Sangat Menunjang	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	73.791.200	73.585.850	Sangat Menunjang	99.7%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 Laporan	73.791.200	73.585.850	Sangat Menunjang	99.7%
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 Dokumen				
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	16,510,000	16,497,200	Sangat Menunjang	99,92%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	2,645,000	2,575,000	Sangat Menunjang	97,35%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum	100%	19.510.000	19.510.000	Sangat Menunjang	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	19.510.000	19.510.000	Sangat Menunjang	100%
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	19.510.000	19.510.000	Sangat Menunjang	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	7.505.000	7.490.000	Sangat Menunjang	99.8%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan APBDes dengan lengkap	13 desa	7.505.000	7.490.000	Sangat Menunjang	99.8%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	7.505.000	7.490.000	Sangat Menunjang	99.8%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/Kurang	%
2	3	4	5			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	44,928,500	44,911,000	Sangat Menunjang	99.96%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	44,928,500	44,911,000	Sangat Menunjang	99.96%
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	47.843.500	47.560.450	Sangat Menunjang	99.4%
JUMLAH			3.180.247.616	2.995.404.515	Sangat Menunjang	94,19%

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak dengan target tahun 2024 adalah 73 realisasi 74,64 sehingga capaian 102,2%. Program yang mendukung Sasaran I adalah :

- a. Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota. Tercapainya target nilai AKIP Kecamatan Perak pada tahun 2024 tersebut harus dipertahankan dan perlu ditingkatkan lagi agar nilai AKIP Kecamatan Perak dapat meningkat dan mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Program yang mendukung Sasaran II adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa.
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Tidak tercapainya sasaran II Kecamatan Perak pada tahun 2024 harus menjadi perhatian bersama agar kedepannya semua stakeholder dapat bekerja sama dan bekerja secara optimal dan professional untuk

mencapai mencapai target yang telah ditentukan agar tujuan organisasi dapat tercapai.

3.2. Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Perak Tahun 2024, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 11 kegiatan, dan 25 sub kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2024 ini Kecamatan Perak mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.180.247.616 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.995.404.515 atau serapan dana APBD mencapai 94,19% sehingga dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran silpa Rp. 184.843.101 Selajutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.8
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	3.025.434.166	95,13%
2.	Meningkatnya kualitas layanan Publik	IKPP Kecamatan Perak	154.813.450	4,87%
TOTAL			3.180.247.616	100%

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	73	74,64	102,2%	3.025.434.166	2.841.094.465	93,91%
Meningkatnya kualitas layanan Publik Kecamatan Perak	IKPP Kecamatan Perak	7,8	8,13	104,2%	154.813.450	154.310.050	99,67%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN				103,2%	3.180.247.616	2.995.404.515	94,19%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Angkutabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 94,19 % telah menghasilkan kinerja sebesar 103,2 % dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar **9,01 %**.

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Perak tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	73	74,64	102,2%	3.025.434.166	2.841.094.465	93.91%
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	3.025.434.166	2.841.094.465	93.91%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	6,001,500	6,001,500	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100%	4,451,500	4,451,500	100%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporan	5 laporan	100%	1,550,000	1,550,000	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%	2,506,813,032	2,362,081,364	94.23%
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Perak yang di fasilitasi	19 Orang/ bulan	19 Orang/ bulan	100%	2,454,556,932	2,309,846,114	94.10%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	51,206,100	51,197,500	99.98%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	1,050,000	1,037,750	98.83%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	100%	110,466,750	103,220,175	93.44%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	24 paket	24 paket	100%	19,236,500	19,205,500	99.84%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	48,400,000	41,810,000	86.38%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	8,990,250	8,990,000	100%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2,352,000	2,352,000	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	31,488,000	30,862,675	98.01%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	121,286,350	117,943,000	97.24%

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	71 unit	71 unit	100%	121,286,350	117,943,000	97.24%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	27,924,500	27,781,221	99.49%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	24 Laporan	24 Laporan	100%	27,924,500	27,781,221	99.49%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	253,470,070	249,089,120	98.27%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	15 unit	100%	56,268,200	52,615,100	93.51%
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	3 unit	3 unit	100%	16,240,000	16,213,350	99.84%

Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Perak yang dipelihara	1 unit	1 Unit	100%	180,961,870	180,260,670	99.61%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak	IKM Kecamatan Perak	94	93,53	99,5%	6.163.750	6.163.750	100%
	IPP Kecamatan Perak	3,10	3,45	111,3%			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	85,3	78,25	91%			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%	6.163.750	6.163.750	100%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	6.163.750	6.163.750	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%	19.510.000	19.510.000	100%

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	100%	100%	19.510.000	19.510.000	100%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 Laporan	12 Laporan	100%	19.510.000	19.510.000	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	7.505.000	7.490.000	99.81%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan APBDes dengan lengkap	13 Desa	13 Desa	100%	7.505.000	7.490.000	99.81%

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen	26 Dokumen	100%	7.505.000	7.490.000	99.81%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	47.843.500	47.560.450	99.4%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 Lembaga	26 Lembaga	100%	47.843.500	47.560.450	99.4%
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa	13 Desa	100%			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 Lembaga	78 Lembaga	100%	47.843.500	47.560.450	99.4%

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	73.791.200	73.585.850	99.7%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 Laporan	5 Laporan	100%	73.791.200	73.585.850	99.7%
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 Dokumen	4 Dokumen	100%			
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100%	16,510,000	16,497,200	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%	2,645,000	2,575,000	
RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				98,81%	3.180.247.616	2.995.404.515	94,19%

3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Perak sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatankualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatanpelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2024-2026 Kecamatan Perak yakni meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Perak melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Perak langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip :

a. **Transparan**

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. **Responsif**

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. **Efisien**

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

f. **Efektif**

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

g. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

h. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Perak melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	102,2%	93,91 %	8,29%
2.	Meningkatnya kualitas layanan Kecamatan Perak	IKPP Kecamatan Perak	102,2%	100 %	2,2%

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran dari sasaran pertama dan kedua. Penjelasan hasil perbandingan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kecamatan

Dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki Kecamatan Perak maka pada tahun 2024 ditetapkan target Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Perak 73 (BB) dan realisasi 74,64 (BB) sehingga capaian kinerjanya 102,2%. Untuk menjalankan sasaran I ini Kecamatan Perak didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 3.025.434.166 dan terealisasi Rp. 2.841.094.465 (capaian 93,91%). Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 8,29%.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas layanan publik

Dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki Kecamatan Perak maka pada tahun 2024 ditetapkan :

1. IKPP Kecamatan Perak didukung Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 6,163,750 dan terealisasi Rp. 6,163,750 (capaian 100%) Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 2,2%.
2. Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait didukung dengan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum dengan anggaran Rp. 19.510.000 dan terealisasi Rp. 19.510.000 (capaian 100%) Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 0%.
3. Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu didukung dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 7.505.000 dan terealisasi Rp. 7.490.000 (capaian 99,81%). Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 0,19%.
4. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu didukung dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 47.843.500 dan terealisasi Rp. 47.843.500 (capaian 99,4%). Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 0,04%.

Total Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Perak tahun 2024 didukung dengan 5 Program tersebut diatas Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 8,1%.

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	73	74,64	102,2 %	20	18	42,11 %	63,16
Meningkatnya kualitas Layanan Publik Kecamatan Perak	IKPP Kecamatan Perak	7,8	8,13	104,23 %	10	4	40 %	40,5
RATA - RATA CAPAIAN IKU				103,2%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		46,18 %	53,82 %

Dari tabel 3.1.1 dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar 53,82 dimana dari 40 anjab ABK Kecamatan Perak ketersediaan SDM adalah 19 dengan persentase ketersediaan 46,18% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai kinerja melebihi target yaitu 97,45%

Tabel. 3.1.2

EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	STANDAR KEBUTUHAN	TINGKAT EFISIENSI %
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	
2	Station Wagon	2	2	
3	Sepeda Motor	30	30	
4	Lemari Besi/Metal	1	1	
5	Lemari Kayu	4	4	
6	Rak Besi	2	2	
7	Rak Kayu	1	1	
8	Filing Cabinet Besi	3	7	
9	Lemari Sorok	2	2	
10	Lemari Kaca	2	2	
11	CCTV - Camera Control Television System	1	1	
12	White Board	2	2	
13	Mesin Absensi	1	1	
14	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1	
15	Mesin Antrian	1	1	
16	Papan Nama Instansi	1	1	
17	Papan Pengumuman	2	2	
18	Alat Kantor Lainnya	1	1	
19	Meja Kerja Kayu	18	18	
20	Sice	2	2	
21	Tempat Tidur Kayu	1	1	
22	Meja Resepsionis	2	2	
23	Meja Panjang	1	1	
24	Meja 1/2 Biro	12	12	
25	Kursi Rapat	70	70	
26	Kursi Tamu	1	1	
27	Kursi Putar	17	17	
28	Bangku Tunggu	7	7	
29	Kursi Lipat	51	51	
30	Partisi	3	3	
31	Meubeleur lainnya	6	6	
32	A.C. Split	10	12	0,83
33	Televisi	4	4	
34	Sound System	2	2	
35	Unit Power Supply	2	2	
36	Mimbar/Podium	1	1	
37	Gordyin/Kray	1	1	

38	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1	
39	Alat Pemadam/Portable	2	2	
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	
42	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	1	
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	8	0,125
44	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	2	
45	Professional Sound System	1	1	
46	Digital LED Running Text	1	1	
47	Layar Film/Projector	1	1	
48	Video Conference	1	2	
49	P.C Unit	10	11	0,91
50	Lap Top	9	10	0,9
51	Note Book	2	2	
52	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1	
53	Monitor	1	1	
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	18	0,83
55	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	3	0,67
56	Peralatan Komputer lainnya	1	1	
57	Peralatan Permainan lainnya	1	1	
58	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	
59	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	
60	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	
61	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	
62	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	1	
63	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	2	
64	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2	2	
65	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	1	
66	Pagar Permanen	1	1	
67	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	1	1	
68	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	
69	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1	
70	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1		
TOTAL SARPRAS		340	359	
RATA-RATA TINGKAT EFISIENSI				0,95

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi BMD tahun 2024 terdapat 340 sarana dan prasarana di Kecamatan Perak sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 359 sarana prasarana jadi untuk tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja adalah 0,95%.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya -Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan Hasil evaluasi SAKIP nomor : X.700/559/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024. Kecamatan Perak memperoleh Nilai Sakip Sebesar 74,64 dengan rincian komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30 %	25,53	85,09
2	Pengukuran Kinerja	30 %	23,58	78,61
3	Pelaporan Kinerja	15 %	6,91	46,07
4	Evaluasi Kinerja	25 %	16,59	66,38
	Total	100 %	72,61	

Dalam poin 1 s/d 4 dapat di simpulkan bahwa hasil evaluasi sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja untuk pemenuhan kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi , namun masih terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian :
 - Pada dokumen Kertas Kerja penetapan Target belum didapati perhitungan yang logis berdasarkan data yang relevan pada setiap komponen penetapan target
 - Target jangka menengah Renstra telah dimonitor pencapaiannya, namun monitoring yang dilakukan sebatas menyajikan capaian sasaran, program, kegiatan tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2024
- b. Pengukuran Kinerja untuk pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, namun masih terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian :
 - Data kinerja yang dikumpulkan secara berkala untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan belum relevan dengan indicator kinerja yang ditetapkan yaitu hanya sebatas pada dokumentasi dan laporan kegiatan tanpa dilengkapi tanpa dilengkapi dengan Analisa perhitungan terkait kinerja yang capai.
 - Setiap pegawai telah peduli atas pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala tribulanan karena sebagai syarat pencairan TPP.
- c. Pelaporan Kinerja sebagian kecil telah terpenuhi, sehingga

masih terdapat hal – hal yang perlu mendapat perhatian :

- Telah menginformasikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah, namun belum memenuhi kualitas kriteria yang di tetapkan
 - Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber dana dan sumber daya manusia, namun belum menyajikan efisiensi sumber daya atas sarana dan prasarana Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan upaya nyata dan/atau hambatan, namun penyajian tidak spesifik sesuai dengan capaian kinerja
 - Laporan kinerja belum dijadikan dasar untuk penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi telah terpenuhi, namun masih terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :
- e. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai karena belum seluruh tim evaluasi internal mendapat bimbingan teknis terkait evaluasi SAKIP
- Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti sehingga belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
7. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Perak pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
8. Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Perak yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan :
- Aspek pelayanan: SOP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan

website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)

- Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
 - Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/ lansia/ ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu.
9. Dalam rangka peningkatan upaya tindaklanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik Kepolisian, Koramil, Satpol PP, BPBD dll.
10. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
11. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes
12. Dalam rangka peningkatan Indeks Reformasi Kecamatan Perak tahun berikutnya berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor: 060/11598/415.10/2024 tanggal 11 Desember 2024 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Perak adalah sebagai berikut:
- a. Kecamatan Perak telah dapat mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi dengan baik, namun belum memberikan pemahaman yang holistic terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada pegawai. Selain itu, keterlibatan pimpinan pada keseluruhan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga belum terlihat ada langkah nyata.
 - b. Belum ada upaya untuk membentuk agen perubahan dan role

model di lingkungan Kecamatan Perak.

- c. Kecamatan Perak telah melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara periodic, namun belum ada unit/tim khusus yang melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi RB PD.
- d. Penerapan SPBE belum cukup optimal ditandai dengan hasil evaluasi penerapan SPBE yang masih pada angka 48.
- e. Belum menunjukkan Akuntabilitas Kinerja yang memuaskan ditunjukkan dengan nilai SAKIP 72,61, dimana idealnya ditandai mulai dengan terwujudnya efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis TI, serta pengukuran kinerja yang akuntabel.
- f. Belum pernah melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Upaya yang dilaksanakan baru sebatas penandatanganan komitmen/pakta integritas, sehingga indikator kegiatan utama Tingkat pembangunan ZI masih pada level 1.
- g. Pengelolaan arsip pada Kecamatan Perak telah masuk dalam kategori baik namun belum optimal, yang diukur dengan Indeks Pengawasan Kearsipan yang mencapai 58,77.
- h. Tingkat pengelolaan pengadaan belum optimal dengan nilai 77 yang diukur dari pemanfaatan Sistem Pengadaan dan Kompetensi SDM.
- i. Profesionalitas pegawai ASN yang diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan peraturan kepala BKN Nomor 8 tahun 2019 masih dalam kategori sangat rendah pada angka 62,65.
- j. Tingkat Internalisasi Core Values ASN memiliki kecenderungan yang memadai untuk menginternalisasi nilai nilai berakhlak yang mencapai 72,93, namun mungkin memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kecenderungan ini dalam perilaku seluruh pegawai hingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- k. Indeks Pelayanan Publik belum cukup optimal yang dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi sebesar 2,45 dengan kategori baik, dengan catatan dimana terdapat aspek yang belum mencapai kondisi.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2024 Kecamatan Perak Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Tabel 3.11

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Hasil	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres
1	Evaluasi atas perencanaan Kinerja agar meningkatkan kualitas perencanaan melalui tahapan penjenjangan kinerja sesuai ketentuan dimulai dari identifikasi masalah berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan terus melibatkan seluruh pegawai melalui penjarangan ide/masukan dalam seluruh proses perencanaan.	Dilakukan rapat internal didalam rangka peningkatan kualitas perencanaan melalui penjenjangan kinerja yang bertujuan <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik/memastikan pelayanan kepada masyarakat Optimal 2. Memastikan tugas dan tanggungjawab dijalankan dengan baik 3. Optimalisasi SDM yang ada di Kecamatan walaupun jumlahnya masih terbatas. 4. Peningkatan kompetensi aparatur Kecamatan melalui pembinaan rutin dan mengusulkan pegawai ke instansi terkait untuk mendapatkan Bimtek/Diklat. 	Notulen hasil rapat internal Kecamatan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan diantaranya melibatkan masukan dan saran seluruh pegawai didalam upaya peningkatan kinerja salah satunya melibatkan semua pegawai dalam penetapan Target kinerja selama setahun.	Januari 2025	Camat	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
2	Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi. Memperhatikan kinerja individu/perangkat daerah dapat menunjang kinerja organisasi di atasnya serta Menyusun mekanisme	Melakukan pengumpulan dan rekap bukti dukung yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai serta telah disusun mekanisme	Bukti dukung pengukuran kinerja telah dikumpulkan dan di upload pada google drive dan dokumen mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi.	Januari 2025	Camat	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

	pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja	didalam pemberian penghargaan dan sanksi.				
3	Laporan kinerja perlu disusun melalui proses analisis yang tepat dan sungguh-sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap periodenya selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja.	Melakukan proses analisis terhadap data-data kinerja selama tahun 2024 untuk melihat keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.	Laporan Kinerja Tahun 2024 telah disusun dengan memperhatikan dan menampilkan data-data yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja selama setahun .	Sampai Maret 2025	Semua PNS Kecamatan Perak	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
4	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan kualitas dokumen yang dapat diwujudkan dalam penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan cascading	<p>a. Dilakukan penyusunan SK Tim Evaluator dan akan mengikutkan anggota Tim dalam kegiatan peningkatan kompetensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>b. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan dokumen pendukung yang dapat diwujudkan dengan kesesuaian dokumen perencanaan kinerja untuk kemudian dituangkan dalam berita acara evaluasi akuntabilitas kinerja.</p>	<p>a. Dokumen SK Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun dilengkapi dengan bukti kompetensi anggota tim.</p> <p>b. Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah disusun berdasarkan kualitas dokumen</p>	Sampai Pebruari 2025	Semua PNS Kecamatan Perak	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

Keterangan :

1. Telah dilakukan rapat internal didalam rangka peningkatan kualitas perencanaan melalui penjenjangan kinerja.

Hasil : - Notulen hasil rapat internal Kecamatan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan diantaranya melibatkan masukan dan saran seluruh pegawai didalam upaya peningkatan kinerja salah satunya melibatkan semua pegawai dalam penetapan Target kinerja selama setahun.

2. Telah dilakukan pengumpulan dan rekap bukti dukung yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai serta telah disusun mekanisme didalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Hasil : Bukti dukung pengukuran kinerja telah dikumpulkan dan di upload pada google drive dan dokumen mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi.

3. Telah proses analisis terhadap data-data kinerja selama tahun 2024 untuk melihat keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Hasil : Laporan Kinerja Tahun 2024 telah disusun dengan memperhatikan dan menampilkan data-data yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja selama setahun.

4. Telah dilakukan Dilakukan penyusunan SK Tim Evaluator dan akan mengikutkan anggota Tim dalam kegiatan peningkatan kompetensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan dokumen pendukung yang dapat diwujudkan dengan kesesuaian dokumen.

Hasil : a. Dokumen SK Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun dilengkapi dengan bukti kompetensi anggota tim.

b. Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah disusun berdasarkan kualitas dokumen.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Perak pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2024. Adapun dari hasil evaluasi pelaksanaan program kerja yang bersifat rutin sebagaimana tersebut di atas bahwa program – program kegiatan Kecamatan Perak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Tahun 2024, anggaran yang telah direncanakan juga bisa terserap dengan baik.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi untuk tahun 2024 yaitu perlu adanya tambahan personil dan peningkatan SDM personil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian penutup dari LKjIP Kecamatan Perak Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Perak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik karena pencapaian kinerjanya telah terealisasi 97,45% atas sasaran-sasarannya yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Perak Tahun 2024, dan hasilnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Kecamatan Perak tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	73	74,64	102,2%
Meningkatnya kualitas layanan Publik Kecamatan	IKPP Kecamatan Perak	7,8	8,13	104,23%
Rata- Rata Capaian IKU				103,2%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Perak dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak dengan target tahun 2024 adalah 73 dapat terealisasi 74,64 (tercapai 102,2%) berkat kerjasama dari masing-masing stakeholder dalam penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksinya.

Untuk sasaran meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan Perak dengan indikator kinerja nilai IKPP telah melebihi target yang ditentukan dari target 7,8 terealisasi 8,13 dengan capaian 104,23% (sangat Memuaskan). Namun demikian prestasi tersebut harus dipertahankan dan perlu ditingkatkan lagi agar sasaran strategis kecamatan dapat mencapai target yang ditentukan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sehingga ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di antaranya sebagai berikut :

1. Indikator sasaran nilai evaluasi AKIP Kec. Perak, berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat ada beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan untuk dokumen SAKIP untuk kedepannya yaitu:
 - Evaluasi atas perencanaan Kinerja agar meningkatkan kualitas perencanaan melalui tahapan penjenjangan kinerja sesuai ketentuan dimulai dari identifikasi masalah berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan terus melibatkan seluruh pegawai melalui penjarangan ide/masukan dalam seluruh proses perencanaan.
 - Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi. Memperhatikan kinerja individu/perangkat daerah dapat menunjang kinerja organisasi di atasnya serta Menyusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja.
 - Laporan kinerja perlu disusun melalui proses analisis yang tepat dan sungguh-sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap periodenya selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja.
 - Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan kualitas dokumen yang dapat diwujudkan dalam penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan cascading.
2. Indikator sasaran nilai IKM yang menjadi komponen perhitungan nilai IKPP Kecamatan, berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu pada unsur kompetensi petugas dan sarana/prasarana, maka upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan nilai IKM yaitu:
 - a. Kompetensi petugas
 - Mengikutsertakan pelatihan khusus terkait service excellent kepada Petugas layanan.
 - Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoring dan peningkatankinerja pelayanan.
 - Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama

b. Sarana dan Prasarana

- Direncanakan pada tahun 2025 akan dilakukan pengadaan Personal Computer dan Filling Cabinet demi kelancaran proses pengurusan administrasi Pelayanan Kecamatan.

3. Komponen indikator berikutnya yang mendukung perhitungan nilai IKPP adalah nilai IPP Kecamatan Perak. Walaupun capaian nilai IPP Kecamatan Perak tahun 2024 melebihi daripada target namun perlu adanya upaya peningkatan nilai IPP sebagai Langkah peningkatan kualitas layanan public di Kecamatan. Kecamatan akan melakukan beberapa alternatif perbaikan atas capaian nilai IPP tahun 2024 melalui beberapa aspek penilaian IPP yaitu:

a. Aspek Kebijakan Pelayanan

- Menambah keterlibatan unsur masyarakat dalam proses penyusunan standart pelayanan.
- Maklumat pelayanan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Bukti dukung harus sesuai dengan yang diinfokan.

b. Aspek Profesionalisme SDM

- Penambahan jam layanan di luar jam pelayanan rutin.
- Mengupayakan penambahan kegiatan yang bisa menumbuhkan motivasi kerja.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

- penambahan fasilitas pendukung layanan untuk untuk kelompok rentan

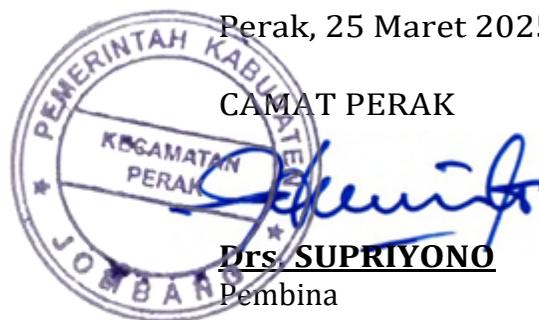
d. Sistem informasi Pelayanan Publik

- Bukti dukung harus sesuai dengan yang diinfokan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Perak, 25 Maret 2025

CAMAT PERAK



Drs. SUPRIYONO

Pembina

NIP.197010131992011001